



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RAPAT KERJA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DENGAN KOMISI IV DPR RI

Jakarta, 28 Maret 2022

KATA PENGANTAR

Berdasarkan agenda Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2022. Agenda Rapat Kerja kali ini mencakup : (1) Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV; (2) Program Prioritas Tahun 2023; dan (3) Isu-isu Aktual Lainnya.

Secara ringkas bahan Rapat Kerja ini membahas beberapa isu yang berkembang terkait dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan terutama pada hal-hal yang menjadi temuan dalam kunjungan kerja reses Yth. Anggota Komisi IV DPR RI beserta respon tindak lanjutnya.

Selanjutnya, pada bahan ini juga disajikan kebijakan dan arahan pembangunan Kementerian LHK TA 2023 yang mengarah pada "Produktivitas Tapak Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Transformasi Ekonomi Indonesia".

Dibahan ini juga kami sajikan isu-isu aktual bidang lingkungan hidup dan kehutanan baik yang bersifat nasional maupun global untuk menciptakan perubahan positif yang mengarah pada perbaikan lingkungan dan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pandangan dan masukan Yth Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI dalam membantu mengawal derap langkah pembangunan LHK.

Jakarta, 28 Maret 2022

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



SISTEMATIKA

1

TINDAK LANJUT KUNGER KOMISI IV

2

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023

3

ISU-ISU AKTUAL LAINNYA



1 TINDAK LANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA RESES DAN SPESIFIK KOMISI IV DPR-RI

01

PENGELOLAAN SAMPAH DAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN

02

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
SECARA ILEGAL

03

PROGRAM PADAT KARYA PERCEPATAN
REHABILITASI MANGROVE

04

PENCEMARAN LINGKUNGAN DI DANAU
SINGKARAK DAN PROGRAM CITARUM HARUM

05

MITIGASI BANJIR DAN LONGSOR
DI AREAL DAERAH ALIRAN SUNGAI

06

PROGRESS PEMBANGUNAN
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)



PERMASALAHAN PENGELOLAAN SAMPAH

TPA Sekoto Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur

“KLHK telah melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui budidaya maggot, budidaya hewan ternak (sapi dan bebek) yang dapat menjadi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di sekitar TPA”.





Penyewaan Lahan di Kawasan Konservasi

KLHK telah melakukan kegiatan :

1. Upaya persuasif/pendekatan kepada masyarakat
2. Operasi intelijen/puldasi untuk mendapatkan data kerawanan
3. Penegakan hukum (operasi pengamanan dan yustisi) terhadap aktivitas illegal di dalam Kawasan Konservasi Penegakan Hukum diprioritaskan kepada pemodal

Permasalahan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

102

Operasi Pengamanan dan Pemulihan Pertambangan

66

Kasus Pidana Penambangan tanpa izin telah P21



Kasus terakhir pada tanggal 20 Maret 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan kegiatan dan penetapan 3 tersangka penambangan ilegal di Kawasan TAHURA Bukit Soeharto, Kalimantan Timur.

PENGGUNAAN DAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN (KELAPA SAWIT)

Upaya penegakan hukum terhadap penggunaan Kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan

676

Operasi pengamanan dan pemulihan kawasan hutan

160

Kasus perambahan kawasan hutan sudah P21

8

Perusahaan yang telah dikenakan denda administrasi

03

HIGHLIGHT ISSUE

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM
PERCEPATAN REHABILITASI
MANGROVE

220 DMPM
Di tahun 2021

BRGM Telah membentuk 220 Desa Mandiri Peduli Mangrove (DPM) dari target 50 pada tahun 2021 yang mana melalui program ini dilakukan pendampingan kepada masyarakat

Persemaian
Mangrove

BPDAS Unda Anyar membangun persemaian mangrove untuk RHL di sekitar Tahura Ngurah Rai dan Pulau Bali pada umumnya.

Pemeliharaan
Tahun I dan II

KLHK sudah menyediakan anggaran pemeliharaan tahun I dan II, dan setelah tahun ke-II akan dilakukan serah terima hasil tanaman kepada pemangku kawasan

Integrasi
Perencanaan di
Desa

Pada tahun 2022 BRGM akan akan melakukan pendampingan desa, penguatan inovasi dan teknologi tepat guna (sekolah lapang) dan integrasi rehabilitasi mangrove dalam dokumen perencanaan desa

Pencemaran Lingkungan Danau Singkarak

Tindak Lanjut

Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah datar masih tercemar ringan sampai tercemar sedang. Beberapa program dan rencana jangka pendek dilakukan dengan Kerjasama Pemerintah Daerah untuk **menginventarisasi keramba jaring apung, potensi pencemar domestic, pemberian pelatihan dan bantuan modal** untuk alternatif ekonomi yang lain





Ekoriparian
Bintang Alam,
Kab. Karawang



IPAL Tahu,
Kab. Sumedang



Recycle wudhu
Tajug Gede,
Kab. Purwakarta

Program Citarum Harum

Tindak Lanjut

Sungai Citarum mengalami penurunan mutu dari cemar ringan menjadi cemar ringan sampai cemar sedang. Beberapa program dilakukan sebagai antisipasi dan penanggulangan pencemaran, diantaranya:

- **Pembangunan fasilitas pengolahan air limbah** di 26 lokasi dan telah menurunkan beban pencemaran Pembangunan sistem 271,40 ton BOD/tahun
- **Pemantauan kualitas air (Onlimo)** di 23 titik
- **Pelaksanaan SPARING** (Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan) oleh 14 Industri
- **Rehabilitasi Hutan dan Lahan** pada Areal IPHPS seluas 100 Ha sejumlah 10.000 batang
- **Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Kebun Bibit Desa (KBD)** di tahun 2021 sejumlah 23 unit dan 2022 sejumlah 28 unit
- **Distribusi bibit gratis** untuk penanganan lahan kritis
- **Koordinasi** dengan Satgas Citarum serta Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor di Areal DAS

Dalam mitigasi bencana banjir di areal DAS, KLHK melakukan kegiatan RHL berupa :

17.000

Insentif bibit kayu di kawasan PTPN VII

43.000

Bibit di Kebun Bibit Desa di Desa Cintamanik, Kab. Garut

8

Bangunan sipil *Gully plug* di Desa Cintamanik, Kab. Garut

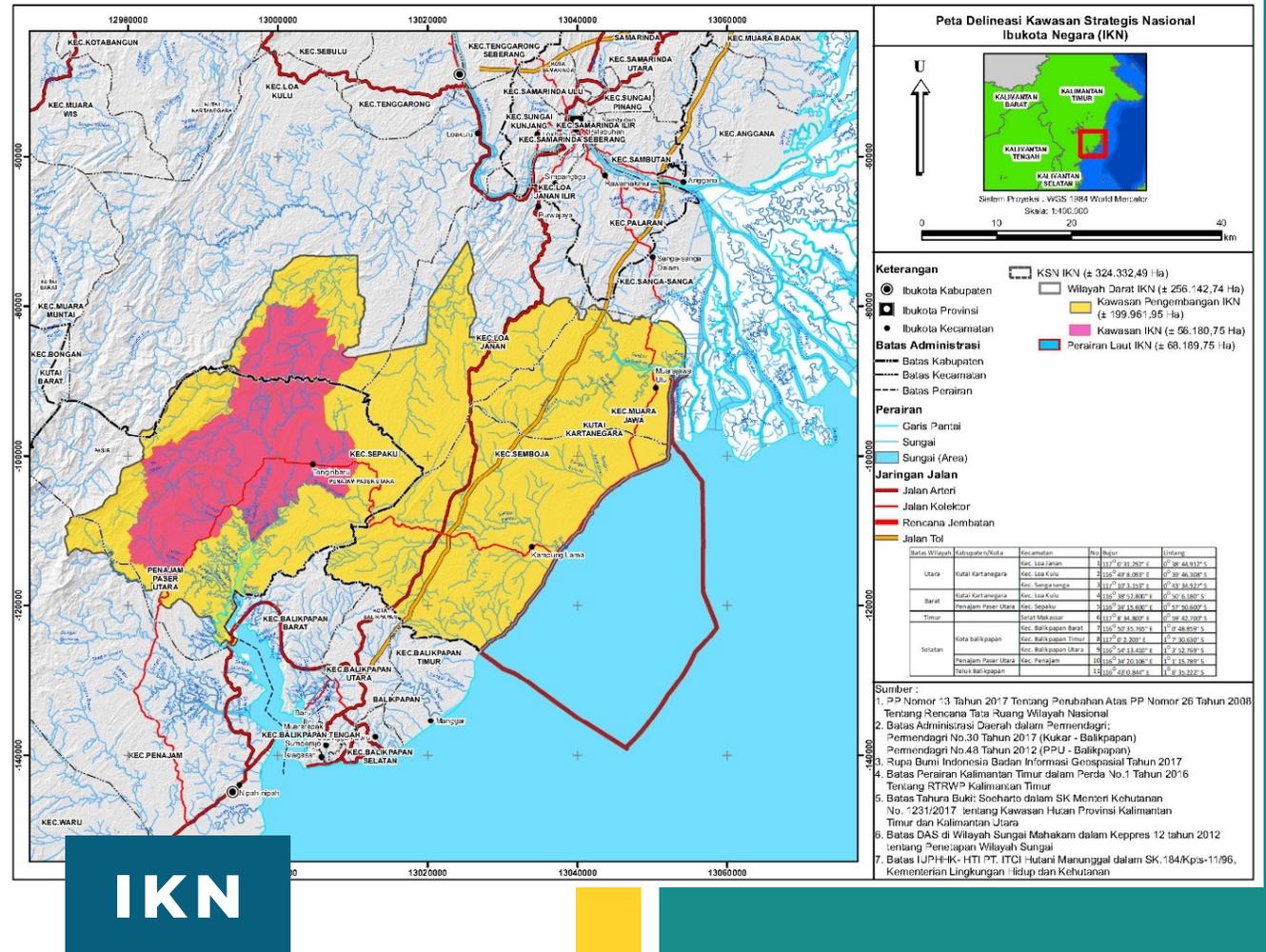
2

Bangunan Sipil DAM Penahan di Desa Cintamanik, Kab. Garut

Progress Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Tindak Lanjut

KLHK telah menyusun **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)** yang detail dan komprehensif untuk menjamin visi **kota cerdas dan berdimensi hutan (forest city)**. Dengan diundangkannya **UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN**, proses pemindahan, pembangunan dan penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara telah memiliki landasan hukum yang kuat. UU IKN ini berisi tentang konsep dasar, asas, prinsip, dan rencana IKN sebagai kota yang aman, modern dan berkelanjutan.



IKN

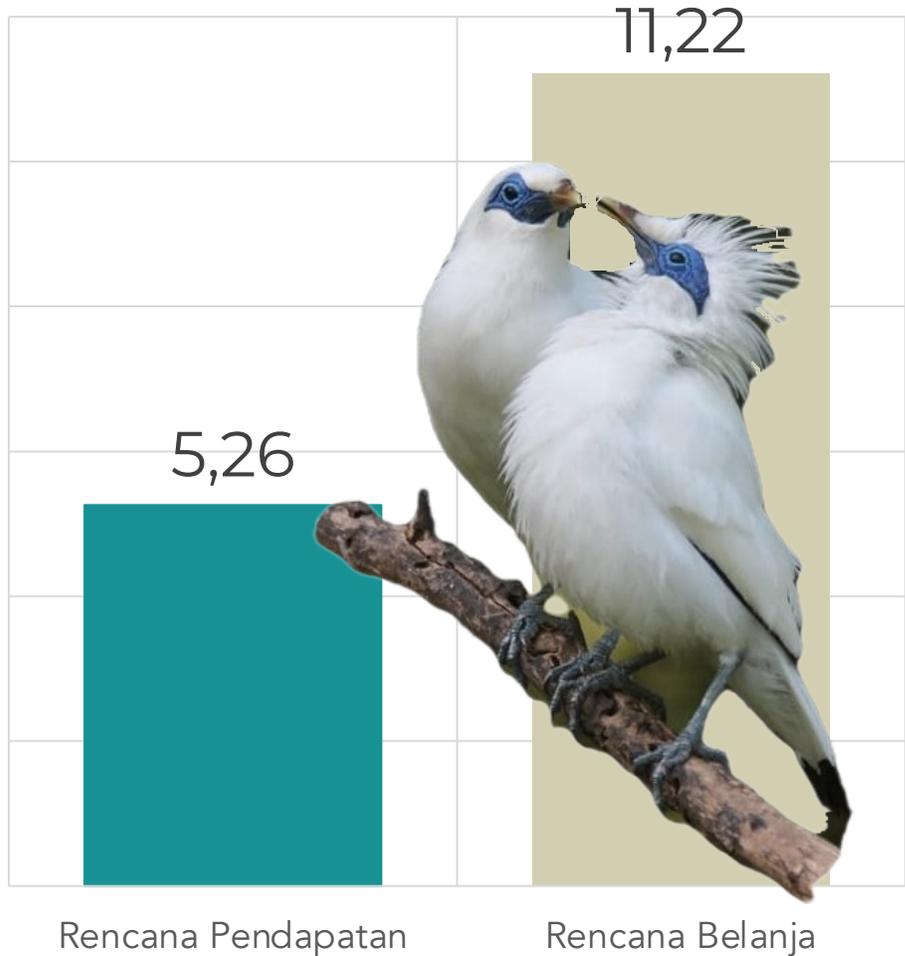


2 PROGRAM PRIORITAS 2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RINGKASAN RAPBN 2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PENDAPATAN : Rp. 5,268 triliun.

Seluruh pendapatan berasal dari penerimaan negara bukan pajak sebagai ekspresi atas pungutan produksi barang jasa sub sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Angka ini meningkat 1,9% dari angka tahun 2022

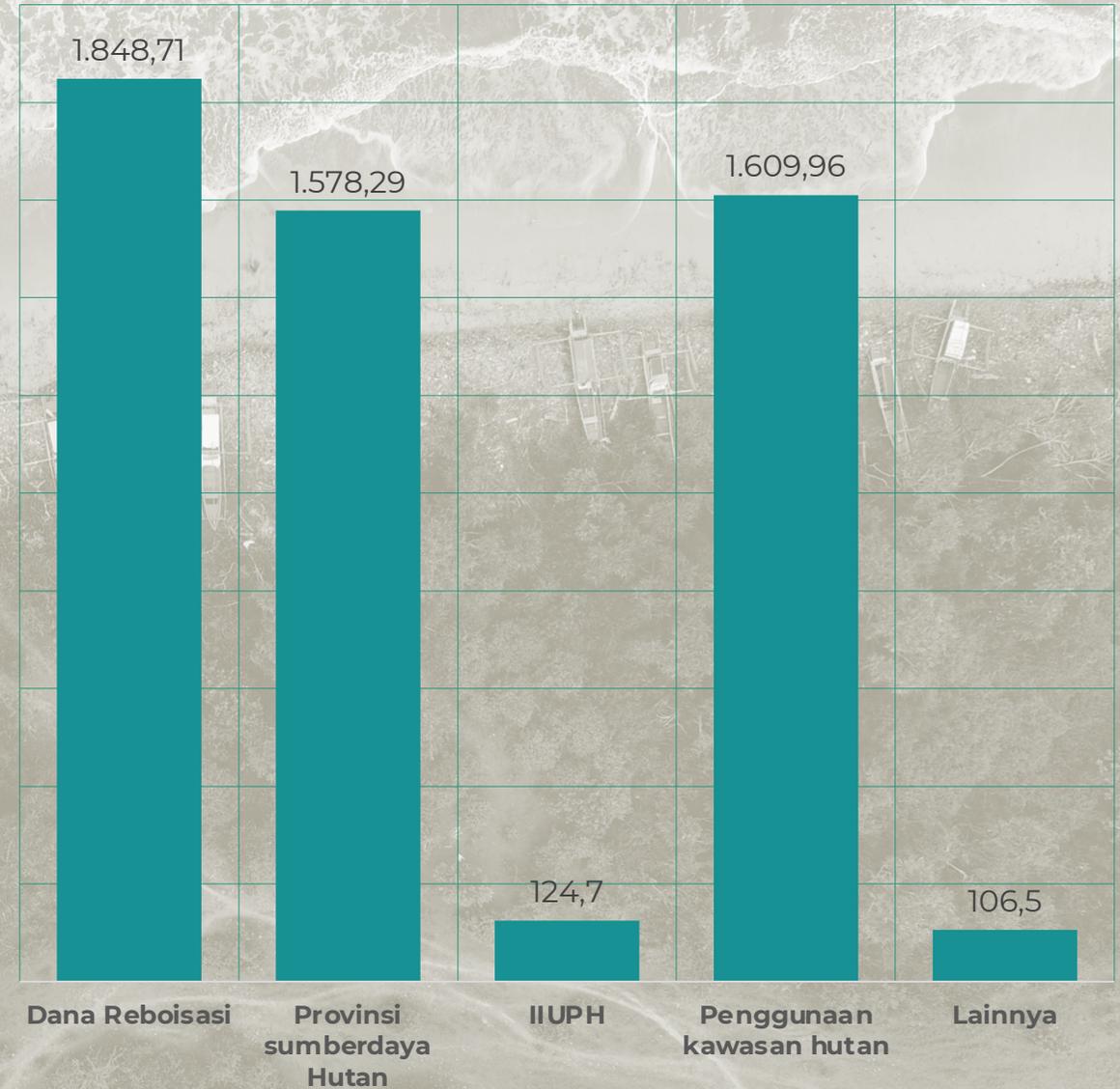
BELANJA : Rp. 11,221 triliun

Belanja Kementerian berusaha menegaskan pesan pembangunan rendah karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan untuk Indonesia yang semakin tangguh. Sasaran utamanya mengikhtisarkan upaya peningkatan produktivitas tapak hutan, penurunan laju deforestasi dan menjaga kondisi lingkungan pada batas toleransi yang dibutuhkan.

PENDAPATAN

Total pendapatan diperkirakan sebesar Rp.5,268 triliun dengan proporsi terbesar adalah dana reboisasi (35,08%), menyusul berikutnya penggunaan kawasan hutan (30,54%) dan provinsi sumberdaya hutan (29,95%). Peningkatan pendapatan dibanding tahun sebelumnya ini menggambarkan peningkatan produksi barang dan jasa di sub sektor lingkungan hidup dan kehutanan

Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rp. Milyar)



BELANJA

Belanja Kementerian digunakan untuk memenuhi kinerja pembangunan nasional dan mendorong perkembangan milestone pembangunan LHK. Koridor yang ditetapkan terhadap belanja Kementerian dituntun oleh kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang sebagai narasi belanja Kementerian 2023.

Rencana Belanja Kementerian (Rp. Milyar)



TEMA DAN ARAH KEBIJAKAN NASIONAL 2023

Tema RKP Tahun 2023 :

Peningkatan
Produktivitas untuk
transformasi ekonomi
yang inklusif dan
berkelanjutan

Sasaran Pembangunan



Pertumbuhan
Ekonomi (%)
5,3-5,9



Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca (%)
27,02



Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
5,3-6,0



Rasio Gini
0,375-0,378



Indeks Pembangunan
Manusia
73,29-73,35



Tingkat
Kemiskinan (%)
7,0-8,0



TEMA PEMBANGUNAN LHK

Produktivitas tapak
hutan dan lingkungan hidup
untuk transformasi ekonomi Indonesia

Tema pembangunan LHK ini menyelaraskan dengan tema pembangunan nasional, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi yang inklusif dan berkelanjutan



RANCANGAN KINERJA UTAMA 2023

PILAR LINGKUNGAN	PILAR EKONOMI	PILAR SOSIAL	PILAR TATA KELOLA
69,48 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rp. 14,1 triliun Kontribusi sektor LH terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	11,83 juta hektar Luas kawasan hutan dengan status penetapan	78 poin Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK
67 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Rp. 118 triliun Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	728,1 ribu hektar Luas hutan yang dilepaskan untuk TORA	83 poin Nilai kinerja reformasi birokrasi
17,33 % Persentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan	US\$ 15 miliar Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting	1.750.000 hektar Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	
0,2 juta hektar Laju deforestasi dan degradasi hutan	Rp. 5,4 triliun Nilai PNBPFungsional KLHK		

KESESUAIAN TEMA PEMBANGUNAN DENGAN MILESTONE PEMBANGUNAN LHK 2020-2024



2020

Intervensi **tapak** untuk menurunkan beban lingkungan, secara berangsur mengembangkan **keberdayaan masyarakat** dan menyiapkan landasan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan untuk membantu pengembangan ekonomi wilayah



2021

Neraca perdagangan non migas dan pertumbuhan **PDB** yang semakin baik, beberapa titik entitas **tapak** pembangunan mulai terlihat membantu pembangunan wilayah, seiring perbaikan lingkungan hidup dan keberdayaan masyarakat



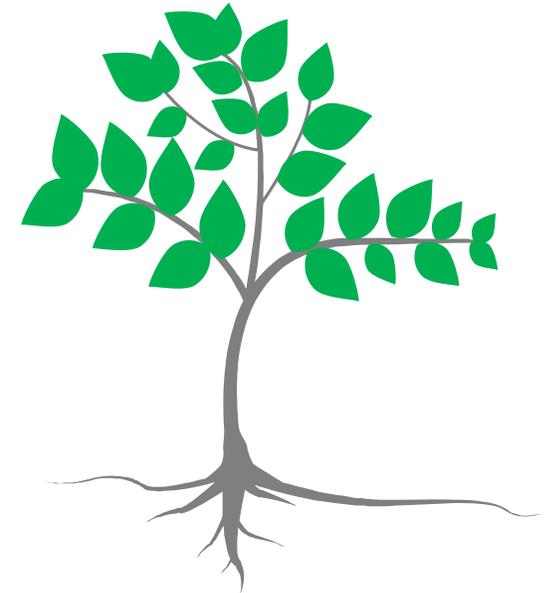
2022

Pemanfaatan sampah dan limbah mulai terlihat di beberapa titik untuk mendukung **ekonomi sirkular**, sumbangan PDB dan neraca perdagangan non migas yang semakin baik, derajat sumbangan entitas **tapak** untuk membantu **pertumbuhan ekonomi wilayah** semakin terlihat, keberdayaan masyarakat kelola hutan dan lingkungan semakin menunjukkan perbaikan



2023

Derajat pemanfaatan **sampah dan limbah** semakin besar untuk meyakinkan bergulirnya ekonomi sirkular, keberdayaan masyarakat semakin merata di seluruh entitas **tapak**, dan gambaran sumbangan pembangunan LHK bagi **makro ekonomi pembangunan wilayah** mulai terlihat di Sebagian besar provinsi



2024

Sirkular ekonomi dan keberdayaan masyarakat akses kelola telah menjangkau di **seluruh provinsi**, seiring perbaikan kondisi lingkungan dan **pertumbuhan ekonomi yang semakin merata**

KERANGKA EKONOMI MAKRO 2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Mempertahankan kondisi dan mengurangi beban lingkungan pada batas toleransi yang dibutuhkan sebagai afirmasi terhadap pembangunan rendah karbon

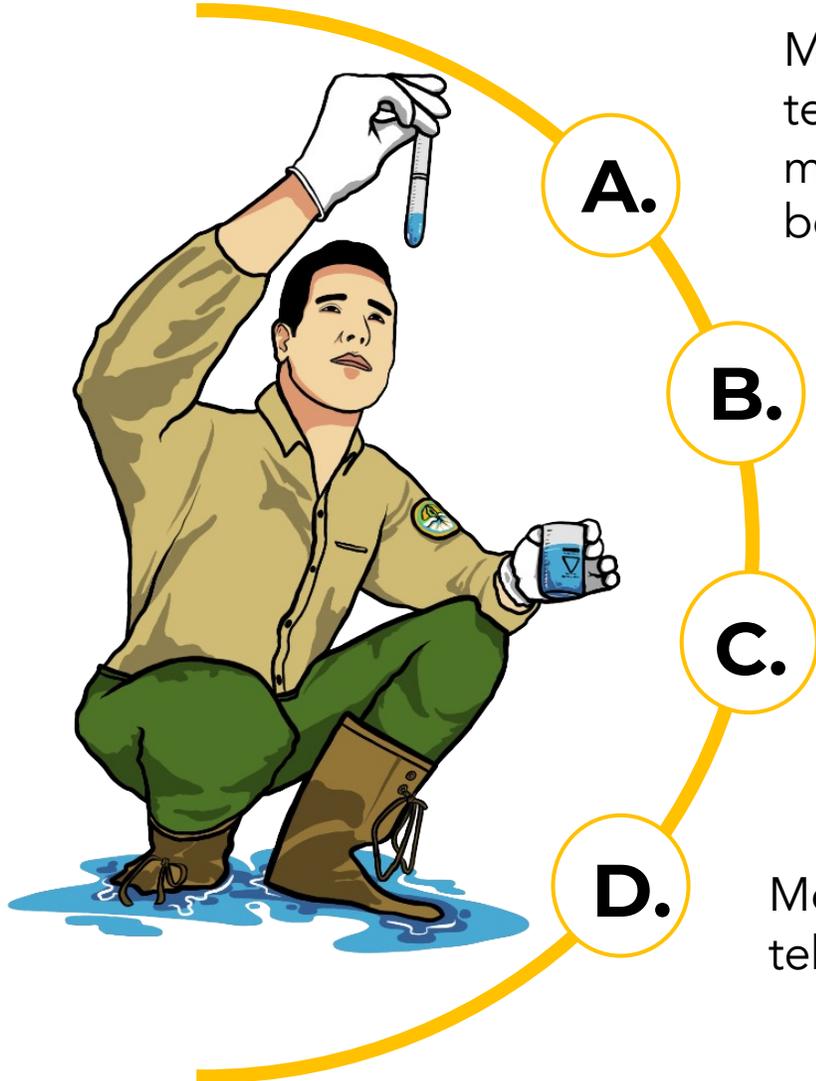
Mempertahankan kecenderungan positif PDB sektor kehutanan dan lingkungan, yang didukung oleh produktivitas masyarakat untuk pemerataan pembangunan wilayah

Menyeimbangkan ruang gerak fiskal dengan meningkatkan PNBPN dan meningkatkan kualitas belanja dan sinergi pendanaan Kementerian, sebagai upaya peningkatan value for money termasuk di dalamnya dana transfer ke daerah di bidang LHK

Meningkatkan produk ekspor untuk membantu keseimbangan neraca perdagangan non migas utamanya dari hasil hutan kayu dan bukan kayu

POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



A.

Mengutamakan pembiayaan berkarakter fix cost utamanya terhadap pemangkuan tapak kawasan hutan, untuk mempertahankan penurunan laju deforestasi dan mengurangi beban lingkungan

B.

Mendorong ruang gerak fiskal yang cukup dengan mendorong pengurangan pemanfaatan belanja pemerintah sebagai rupiah murni pendamping hibah luar negeri

C.

Meningkatkan belanja masyarakat, utamanya pembiayaan berkarakter padat karya untuk mendorong produktivitas masyarakat dan pemerataan pembangunan wilayah

D.

Mengurangi biaya aparatur dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan hutan dan lingkungan

INTERNALISASI PRIORITAS NASIONAL KE DALAM PEMBANGUNAN LHK 2023

PRIORITAS NASIONAL	INTERVENSI DAN INTERNALISASI PEMBANGUNAN LHK
<p>PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan</p>	<p>Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, utamanya di wilayah hulu</p> <p>Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan destinasi wisata</p>
<p>PN 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</p>	<p>Membantu menyiapkan ibu kota Nusantara</p>
<p>PN 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing</p>	<p>Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan perhutanan sosial, tanah objek reforma agrarian dari kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan</p>
<p>PN 3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim</p>	<p>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</p> <p>Meningkatkan ketahanan bencana dan iklim</p>

Dukungan KLHK untuk Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 (Indikasi)

Belanja Kementerian LHK Tahun 2023 terus diupayakan untuk membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat seperti Bang PeSoNa, KBR, Usaha Ekonomi Produktif, Pembentukan KTH Mandiri, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Dalkarhutla, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove

Total usulan anggaran belanja untuk pemberdayaan masyarakat tahun 2023 sebesar **Rp.985,21 Miliar** atau naik sebesar **Rp.362,67 Miliar (58,25%)** dibanding tahun 2022 sebesar Rp.622,54 Miliar





3

**ISU-ISU
AKTUAL**

- **FoLU NET SINK 2030**
- **IKN DAN KONSEP FOREST CITY**
- **COP-MINAMATA**
- **G-20**

FOLU NET SINK 2030

Upaya menjaga hutan secara lestari dalam rangka pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2030



SASARAN FoLU Net Sink 2030

- 140 Juta ton CO₂e

Target capaian tingkat emisi gas rumah kaca pada tahun 2030

LANGKAH KOREKTIF SEKTOR KEHUTANAN



AKTUALISASI DAN INTERNALISASI PRINSIP DDDT



PENURUNAN SIGNIFIKAN LAJU DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DAN LAHAN



PENCEGAHAN PERMANEN KEJADIAN KARHUTLA



PENCEGAHAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI



PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN KLHK



PERUBAHAN ARAH PENGELOLAAN HUTAN



PEMBANGUNAN KETAHANAN IKLIM



AKTUALISASI KESEIMBANGAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN DENGAN ADANYA UUCK

RUANG LINGKUP FoLU Net Sink 2030



1

Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral

2

Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut dan Mangrove

3

Pengurangan Laju Degradasi Hutan Lahan Mineral

4

Pengurangan Laju Degradasi Hutan Lahan Gambut dan Mangrove

5

Pembangunan Hutan Tanaman

6

Pengelolaan Hutan Lestari

7

Rehabilitasi Dengan Rotasi

8

Rehabilitasi Non Rotasi

9

Restorasi Gambut dan Perbaikan Tata Air Gambut

10

Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang

11

Konservasi Keanekaragaman Hayati

12

Perhutanan Sosial

13

Introduksi Replikasi Ekosistem, Ruang Terbuka Hijau dan Ekoriparian

14

Pengawasan dan *law enforcement* dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan

KEBIJAKAN DAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. Kebijakan Umum Sektor FOLU menuju *Net Sink*

- Kegiatan prakondisi kawasan hutan
- Mempertahankan hutan alam yang masih tersisa
- Mendorong terjadinya regenerasi hutan alam terdegradasi
- Efisiensi penggunaan lahan dan optimasi lahan tidak produktif
- Akselerasi kegiatan penyerapan karbon
- Pengembangan kebijakan fiskal untuk sektor FOLU
- Kegiatan penegakan hukum atau *law enforcement*
- Kegiatan penguatan basis data sektor FOLU





II. Kebijakan Terkait Mangrove

Mangrove dapat menjadi peluang untuk selanjutnya dielaborasi dalam RENOP *FOLU Net Sink* 2030 karena kapasitas mangrove dalam mengurangi emisi dari sektor lahan belum diperhitungkan baik di dalam NDC maupun di dalam dokumen LTS-LCCR.

Potensi *blue carbon* yang cukup tinggi pada mangrove yang meliputi; *above ground biomass*, *soil mangrove* maupun *below ground biomass* dapat didalami lebih lanjut



LUAS MANGROVE EKSISTING DI INDONESIA

3.364.080 ha

Total luas mangrove di
Indonesia (100%)

3.121.240 ha

Kelas kerapatan tajuk
mangrove lebat
(92,78%)

188.366 ha

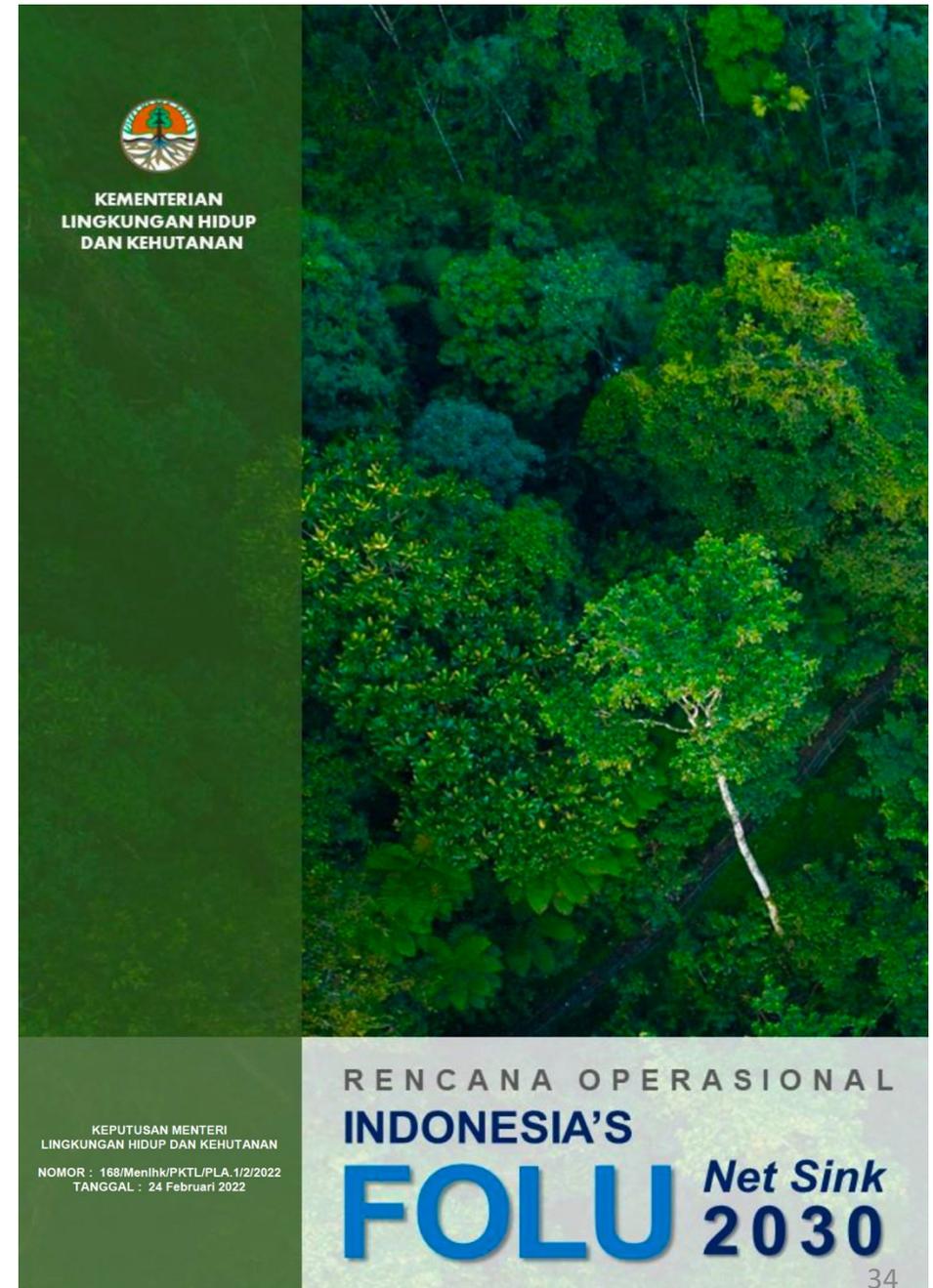
Kelas kerapatan tajuk
mangrove sedang
(5,60%)

54.474 ha

Kelas kerapatan tajuk
mangrove jarang
(1,62%)

Rencana Operasional FoLU Net Sink 2030

Agenda FoLU Net-Sink 2030 adalah amanat Perpres 98 Tahun 2021 dan telah diterbitkan Rencana Operasional FoLU Net-Sink 2030 dengan KEPMENLHK No 168 tahun 2022.



TUJUAN RENCANA OPERASIONAL INDONESIA FoLU Net Sink 2030

1

Memantapkan kebijakan dan implementasi kerja untuk mencapai *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* dengan langkah-langkah yang sistematis dan terukur

2

Menetapkan rencana operasional kerja aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan menuju *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*

3

Menjabarkan target NDC ke dalam detail rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan dengan pendekatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*

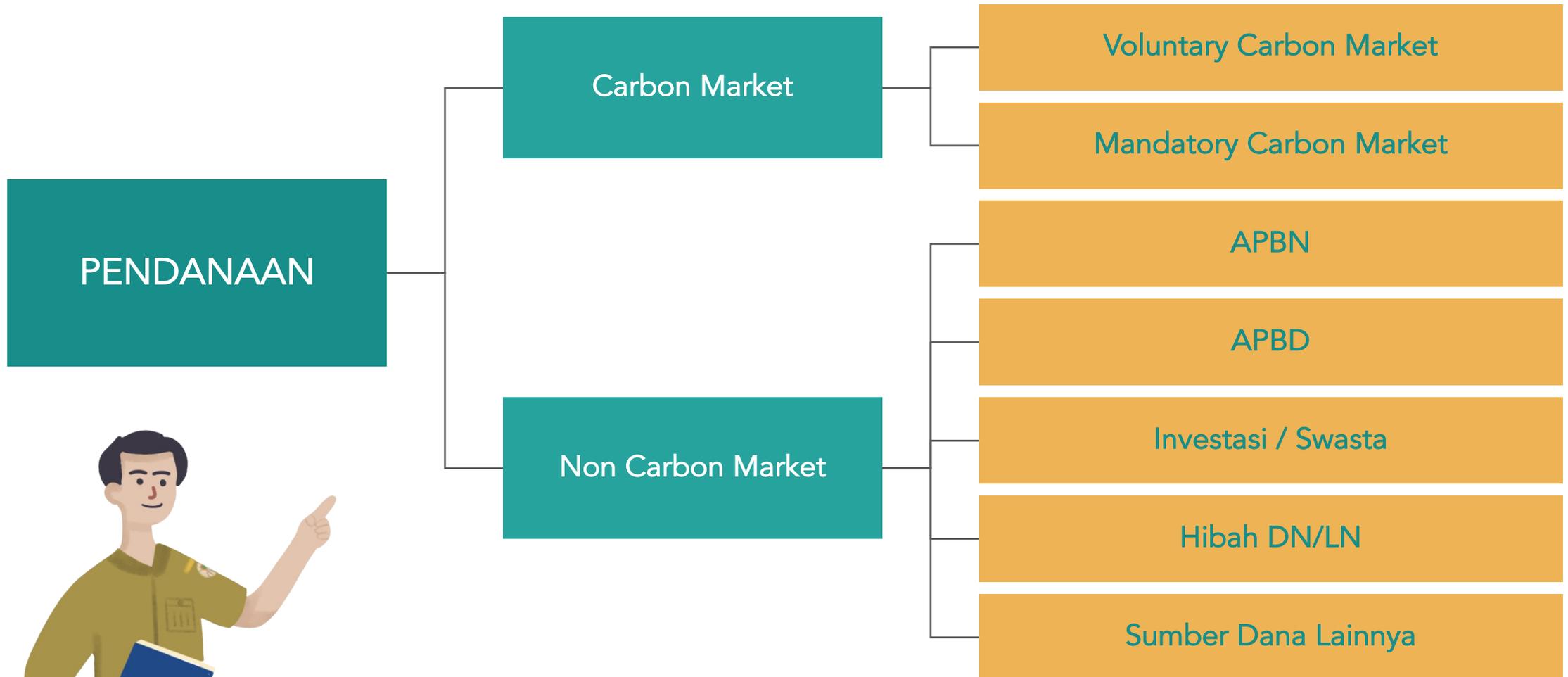
4

Menegaskan kegiatan penopang utama pelaksanaan program dan kegiatan penurunan emisi GRK sektor kehutanan dan serta tahapan kerja dan operasionalisasi serta evaluasinya

5

Menyusun *Manual of Operation* dari setiap kebijakan dan langkah penopang utama Program Nasional "*Indonesia's FOLU Net Sink 2030*"

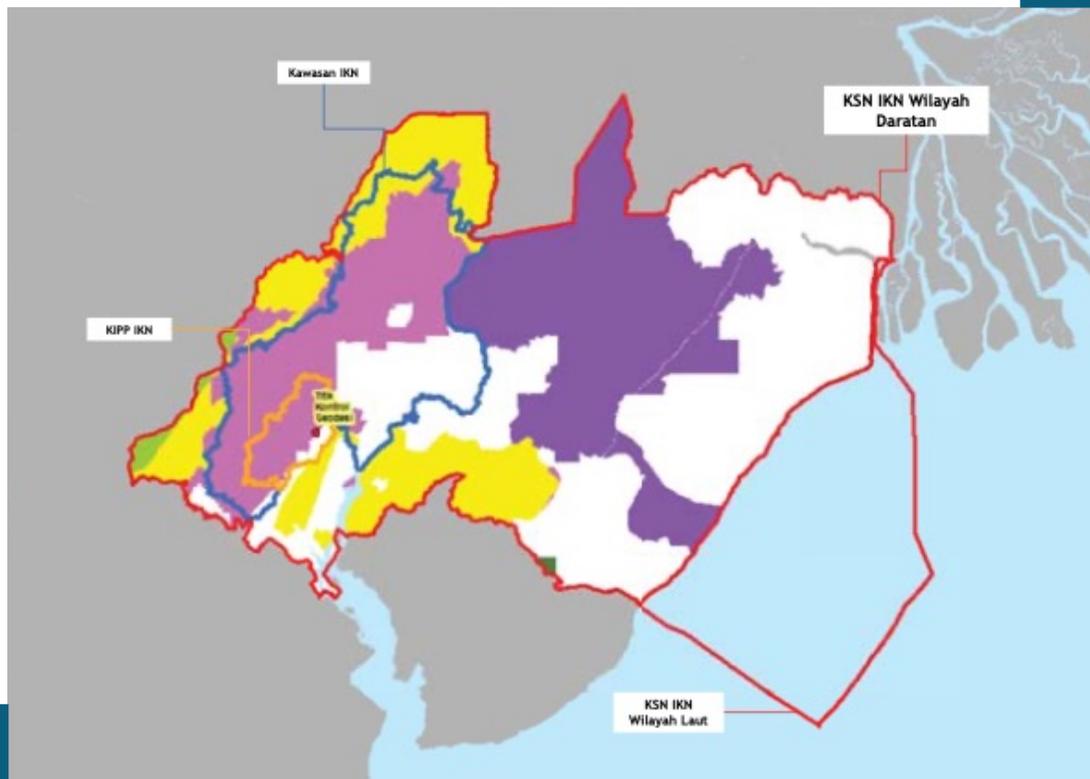
SKEMA PENDANAAN AKSI PENURUNAN EMISI GRK SEKTOR FOLU





IKN DAN KONSEP *FOREST CITY*

CAKUPAN WILAYAH IBU KOTA NEGARA NUSANTARA



Pasal 6 UU 3 Tahun 2022

Wilayah Ibu Kota Nusantara meliputi:

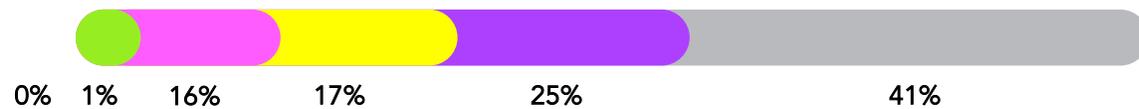
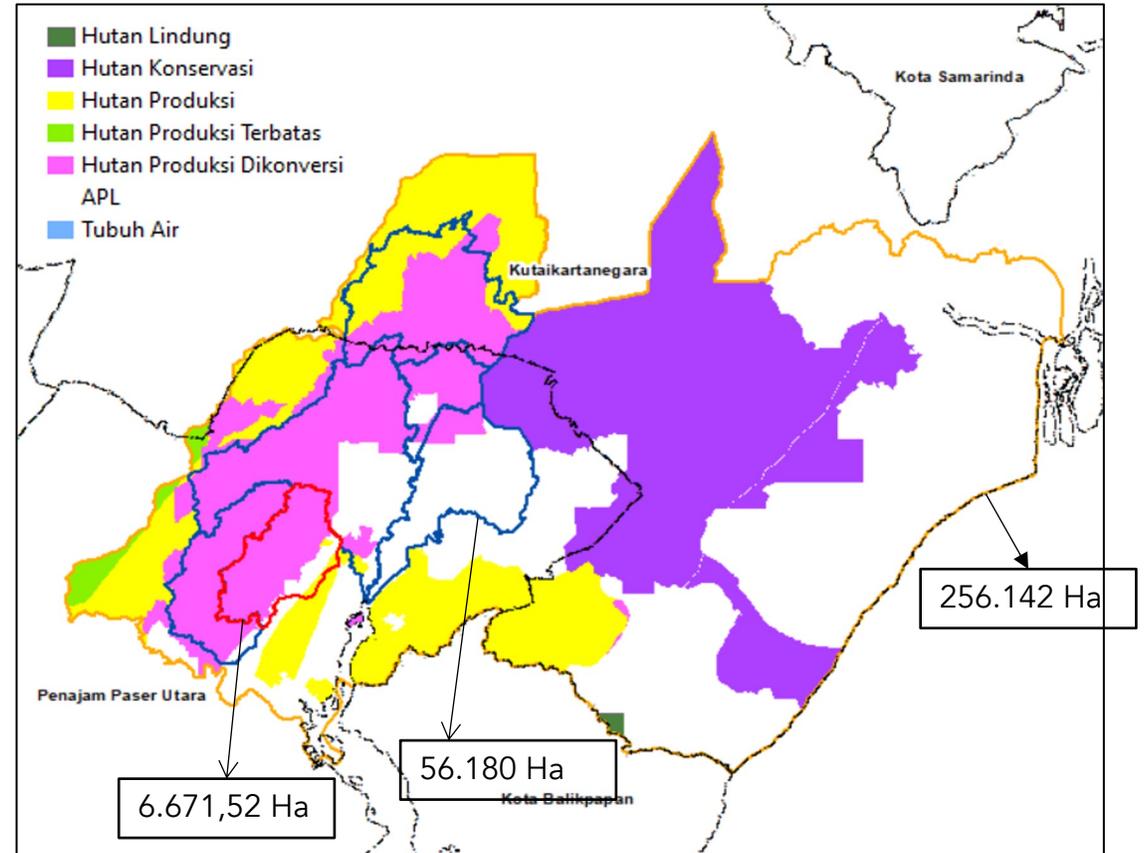
- a. Wilayah daratan seluas kurang lebih seluas **256.142 Ha** yang mencakup:
 - Kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 Ha, termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang mengacu pada Rencana Induk KSN IKN dan RTR KSN IKN (seluas 6.671,52 Ha).
 - Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas **199.962 Ha**.
- b. Wilayah laut seluas kurang lebih **68.189 Ha**.

KAWASAN HUTAN DI WILAYAH IKN SK PENGUKUHAN No. 6228 TH 2020

Deliniasi Wilayah IKN (Sementara)



Kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN) Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP-IKN)



- Hutan Lindung
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Konservasi
- Hutan Produksi Konversi
- APL

An aerial photograph of a vast, dense forest. The trees are a mix of dark green and lighter green, suggesting different species or stages of growth. In the center of the image, a small white vehicle is parked on a narrow dirt road that winds through the trees. In the background, a hillside is visible, partially covered in forest and partially in agricultural fields. The sky is overcast and grey.

Ibu Kota Negara sebagai *FOREST CITY*

Kota yang Menempatkan Ekosistem Hutan sebagai Pembentuk Struktur Ruang Perkotaan, Orientasi Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dan Memfasilitasi Interaksi antar Kegiatan Perkotaan.



MANFAAT KONSEP *FOREST CITY*



Menambahkan infrastruktur ekologis rencana struktur dan kawasan hijau–biru pada pola ruang pada RTR KSN IKN



Memperkuat aspek ekoregion dalam penetapan KPI pengembangan IKN dan strategi ketujuh kluster ekonominya; dan



Bahan masukan utama untuk Penyusunan RTBL KIP

DIMENSI DAN PRINSIP KONSEP *FOREST CITY* UNTUK IBU KOTA NUSANTARA

DIMENSI LINGKUNGAN

Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelestarian Hutan



Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu



Aman Dari Ancaman Bencana dan Dampak Perubahan Iklim



DIMENSI EKONOMI



Pembangunan Ekonomi Hijau

Pengembangan Ekonomi Berbasis Konservasi dan Biodiversitas

DIMENSI SOSIAL BUDAYA

Keterlibatan Masyarakat Lokal



Identitas Peradaban, Nilai Historis dan Budaya



DIMENSI TATA KELOLA

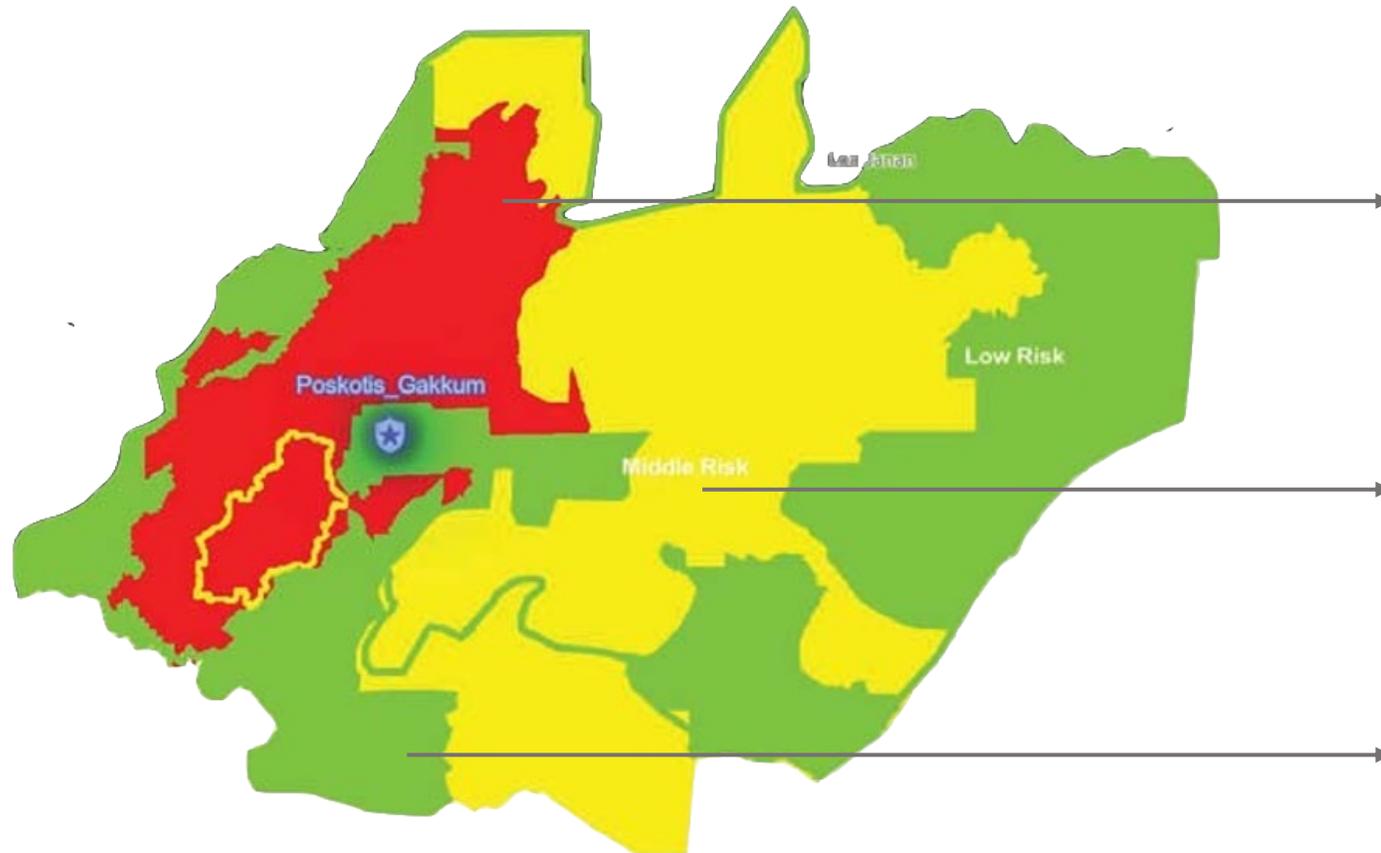


Pengelolaan Wilayah IKN Terintegrasi

Dukungan Kebijakan Strategis Berketahanan dan Responsi

Pelibatan Aktif Stakeholder

PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN PETA RESIKO



Zone High Risk ■

Fokus wilayah ini adalah areal seluas 50.921 Ha yang meliputi areal Ring I, hutan pelepasan konsesi ITCI seluas 42.150 Ha, perkebunan dan pertambangan ilegal, serta pemukiman di Kawasan hutan areal Ring I.

Zone Middle Risk ■

Fokus wilayah ini adalah areal seluas 200.366 Ha yang meliputi bekas areal tambang di Ring II dan Ring III.

Zone Low Risk ■

Fokus wilayah ini adalah areal seluas 50.218 Ha areal Ring III, keseluruhan areal sekitar IKN di luar Zona High Risk dan Middle Risk khususnya kawasan hutan, jalur peredaran dan pengangkutan hasil hutan dan TSL serta pemukiman sekitar Kawasan hutan.

PERSEMAIAN MENTAWIR

UPAYA UNTUK MEMBANGUN HUTAN TROPIS BASAH IKN
DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN KALIMANTAN TIMUR



PERSEMAIAN MENTAWIR

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU)



32,5 Ha

Luas persemaian yang berlokasi di Desa mentawir, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

15 juta batang

Kapasitas bibit yang diproduksi setiap tahunnya

CATATAN FORUM PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI KEHUTANAN INDONESIA (FORETIKA) ATAS IKN

“

Lima prinsip utama ketika ingin membangun hutan tropika buatan: *Ecological function, Protection function, Production function, Socio-cultural aspect, Participatory*, termasuk peran daerah (misalnya kearifan lokal, spesies lokal adalah daerah tersebut yang paling memahami)

”

Dr. Rinikso Kartono

“

Penerapan Silvikultur Intensif melalui Rehabilitasi dengan spesies terpilih, Rehabilitasi lahan tak berhutan menjadi hutan alam

Prof. Moh. Naiem

”

“

Forest city, forest village tidak akan mungkin dibangun, tanpa melibatkan isu sosial, sehingga membutuhkan detailing data sosial dalam pembangunan IKN yang baik (aman dari konflik sosial, termasuk area penyangganya)

”

Prof. Mustofa Agung

“

Konsep forest city IKN, bukan hutan tanaman, namun taman hutan alam yang sangat indah yang tidak sulit dan mahal, hanya perlu mendesain landscape, jenis vegetasi, dan terkait hal ini akan dibantu desain oleh para arsitek landscape (butuh kolaborasi)

”

Dr. Irdika Mansur



CATATAN FORUM PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI KEHUTANAN INDONESIA (FORETIKA) ATAS IKN

“

IKN harus mempunyai tujuan, misalnya terjaganya *high biodiversity*, hingga dipertahankan dan diperkaya (missal *total above ground carbon/vegetasi* atas menjadi perhatian)

Dr. Sigit Sunarta

”

“

Kami siap melakukan pendampingan dan inovasi terkait IKN dan FOLU Net Sink

Prof. Kissinger

”

“

IKN merupakan momentum *Getting Biodiversity Back*, yaitu penghuni hutan tidak hanya kayu komersial namun ada juga biodiversity yang berpotensi sebagai hosting species virus manusia

Dr. Endah Sulistyawati

”



COP-4 INDONESIA

ONLINE 1-5 NOVEMBER 2021
BALI 21-25 MARCH 2022

MAKE MERCURY HISTORY



**MINAMATA
CONVENTION
ON MERCURY**

COP MINAMATA

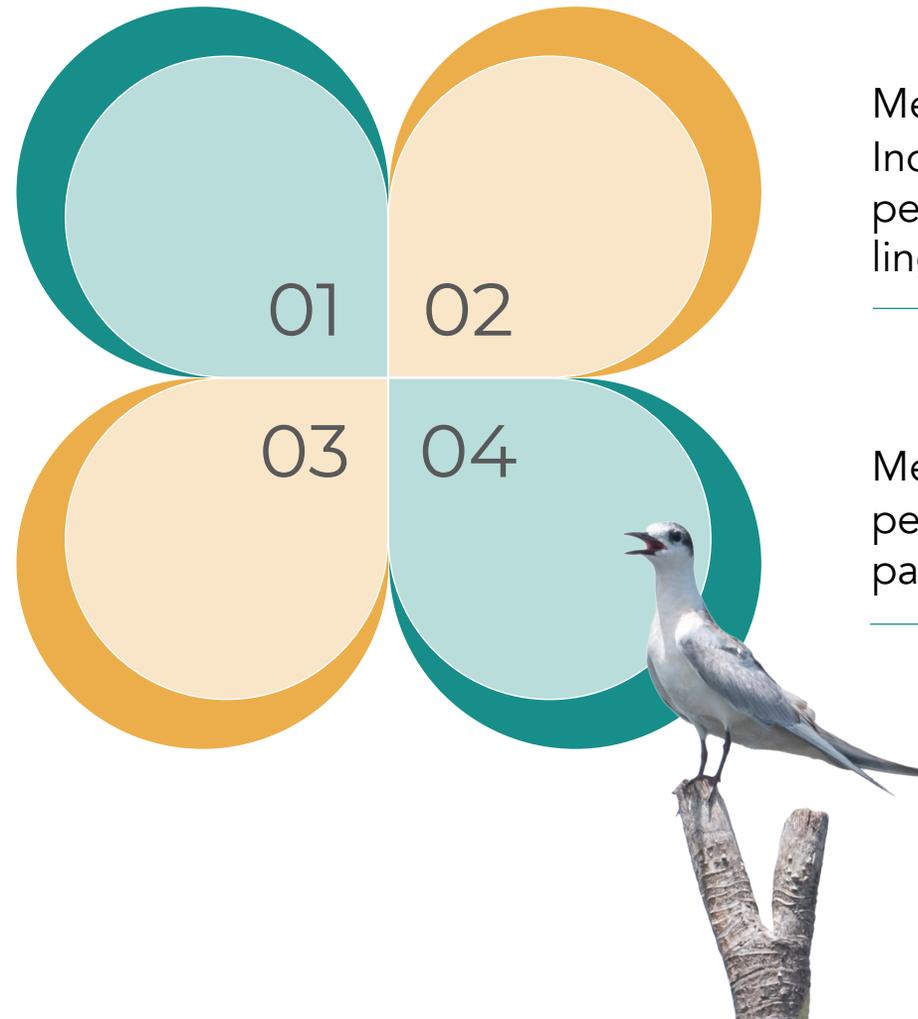


KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

POSISI STRATEGIS CPO 4 MINAMATA BAGI INDONESIA

Menunjukkan kepada dunia internasional upaya serius Indonesia dalam penanganan merkuri

Meningkatkan dukungan internasional terhadap kebijakan nasional pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia



Mengukuhkan kepemimpinan Indonesia dalam memainkan peran sentral diplomasi lingkungan hidup global.

Mendukung program pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19.

KOMITMEN INDONESIA DALAM PENANGANAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

- 1) Implementasi Kebijakan Nasional Perpres Nomor 21 tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
- 2) Implementasi terintegrasi dengan pemerintah daerah,
- 3) Implementasi terintegrasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders)



ISU PENTING PADA COP 4.2

Evaluasi Pelaksanaan 01

Pelepasan Merkuri 02

Limbah Merkuri 03



04

Pemutakhiran dokumen penyusunan rencana aksi nasional (RAN) tentang pengurangan penggunaan merkuri di pertambangan emas rakyat dan skala kecil

05

Produk yang mengandung merkuri dan proses manufaktur produk merkuri

06

Pengarutamaan Gender

BALI DECLARATION

Pemerintah Indonesia mengusulkan suatu Deklarasi (*non-legally binding declaration*) yang mengangkat isu perdagangan ilegal Merkuri berjudul "*Declaration on Combating Global Illegal Trade of Mercury*".



LATAR BELAKANG

Perdagangan ilegal merkuri salah satu masalah utama dalam pengelolaan merkuri. Perlu penguatan komitmen dan Kerjasama global melalui untuk mengatasi tersebut

TUJUAN

1. Pengarusutamaan isu perdagangan ilegal merkuri
2. Memerangi perdagangan ilegal merkuri
3. Melengkapi Konvensi Minamata memenuhi kewajiban umumnya

BALI DECLARATION

4 Hal Pokok Muatan Deklarasi Bali :

1. Mendorong kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan pengawasan
2. Mempromosikan Pendidikan ,penelitian dan studi
3. Mendorong kebijakan, peraturan dan tindakan internal lainnya yang kondusif dan memungkinkan
4. Mempromosikan kerja sama pihak ketiga seperti donor, e-commerce, peningkatan kapasitas, serta bantuan teknis





G20 INDONESIA
2022



1st Environment Deputies Meeting & Climate Sustainable Working Group (EDM-CSWG)

21-24 Maret 2022 di Yogyakarta



ENVIRONMENT DEPUTIES MEETING (EDM)



Dibagi kedalam 3 sesi, membahas mengenai :

1. Pandangan dunia dan pengalaman dalam isu masalah pengelolaan air serta solusinya
2. Pengalaman nasional dan praktik terbaik dalam menerapkan kebijakan dan meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan air
3. Identifikasi kesenjangan dan merumuskan solusi.



CLIMATE SUSTAINABLE WORKING GROUP **(CSWG)**

Dibagi ke dalam 3 sesi, membahas mengenai :

1. Inventarisasi ekonomi, dampak sosial dan lingkungan dari pemulihan berkelanjutan termasuk dampak implementasi NDC
2. Solusi berbasis laut untuk perubahan iklim melalui peningkatan kerjasama dalam ilmu pengetahuan, penelitian dan inovasi
3. Rekomendasi kerangka keuangan inovatif menuju emisi GRK rendah dan masa depan ketahanan iklim



HASIL PERTEMUAN 1ST EDM-CSWG



6 Keluaran (*outcome*) Rekomendasi

Pengurangan Degradasi Lahan :
Restorasi Lahan Gambut dan
Mangrove

1

6

Pembiayaan Berkelanjutan

Mencegah Kehilangan
Keanekaragaman Hayati

2

5

Konservasi Laut

Penanganan Sampah Laut

3

4

Menjaga Ketahanan dan
Kualitas Sumber Daya Air





TERIMA KASIH